

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF NANCY FRASER

Yulianus Junin¹, Norbertus Jegalus², Oktovianus Kosat³
lianjunin79@gmail.com¹, norbertus2306@mail.com², kosatkote@gmail.com³
Universitas Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mendalami esensi keadilan sosial menurut sudut pandang Nancy Fraser. Gagasan utama dalam tulisan ini adalah keadilan sosial merumuskan tiga aspek penting dalam konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser, yaitu klaim redistribusi, klaim rekognisi dan representasi. Klaim redistribusi mengacu pada distribusi ulang sumber daya dan kekayaan secara adil. Rekognisi berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap identitas, perbedaan, dan martabat setiap individu dalam masyarakat, sementara representasi pentingnya partisipasi politik yang setara dan inklusif dalam pembentukan keputusan masyarakat. Klaim ini memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses politik dan bahwa wakil-wakil yang terpilih mewakili kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok elit. Nancy Fraser berpendapat bahwa keadilan sosial yang komprehensif harus memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan agar supaya tidak merugikan dikotomi partisipasi Gender diruang publik.

Kata kunci: Nancy Fraser, Keadilan Sosial, Redistribusi, Pengakuan, Representasi.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan suatu sifat dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konsep keadilan sosial terdapat juga pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dalam hubungan antarpribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual.

Dewasa ini keadilan sosial menjadi problem dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dalam berbagai dimensi seperti persoalan kesetaraan gender, minoritas, ketidakadilan hukum, dan akses sosial ekonomi juga menjadi isu pembangunan dewasa ini. Terkait problem ini Nancy Fraser menawarkan sebuah solusi dengan berpedoman pada konsep redistribusi dan pengakuan dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Bagi Nancy Fraser dua teori ini merupakan salah satu jalan keluar yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Teori redistribusi adalah suatu teori yang berurusan dengan masalah eksploitasi kerja, ketimpangan akses pada sumber daya dan pertentangan kelas. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali hubungan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan sosial. Teori pengakuan adalah suatu teori yang berurusan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalisme. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural. Fraser melihat bahwa persoalan utamanya adalah kedua macam politik itu kerap kali ditangani secara terpisah. Seakan-akan budaya dan ekonomi-politik adalah dua ranah yang berdiri sendiri.

Realitas yang terjadi bahwa diskursus tentang kemajemukan, cenderung dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan. Padahal, politik rekognisi hanya bisa berjalan kalau itu dilangsungkan berbarengan dengan politik redistribusi. Demikian halnya, kemajemukan yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila sumber masalah ketidakadilan ekonomi dibereskan terlebih dahulu. Hal yang sebaliknya pun terjadi, penyelesaian atas ketidakadilan ekonomi kerap kali mensyaratkan strategi kebudayaan yang dapat menginisiasi perubahan

sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan dan analisis kritis yang mengacu pada beberapa karya penting Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, *Reweaving the Social Fabric: Some Thoughts on the Future of Social Policy* dan sumber sekunder yang mendalami pemikiran Fraser tentang keadilan sosial. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan pembahasan yang lebih mendalam tentang topik atau topik yang dibahas dalam artikel ini. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan meninjau literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus keadilan Nancy Fraser dalam konteks pemikir kontemporer menggunakan cara pendekatan yang kritis-komprehensif dan konstruktif bagi korban dari ketidakadilan sosial. Dia menyuarakan sebuah seruan keadilan sosial bagi semua orang dengan berpedoman pada konsep redistribusi, pengakuan dan normativitas keadilan dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagi Nancy Fraser pendekatan yang ia hasilkan ini merupakan salah satu jalan keluar yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keadilan Menurut Nancy Fraser

Fraser melihat bahwa konsep keadilan itu bergerak atau berubah seturut perubahan zaman atau era globalisasi (*Globalization is changing the way we argue about justice.*). Teori Fraser tentang keadilan dibangun dalam konteks 'kondisi pasca-sosialis' dan itu menyatukan oposisi dikotomis lainnya antara 'politik kesetaraan' dan 'politik perbedaan'.

Nancy Fraser telah mengambil tantangan yang ditinggalkan oleh teori keadilan Rawls dan Habermas untuk mengembangkan lebih jauh pandangan kompleks dan dinamis tentang keadilan yang mereka kemukakan. Konteks historis dari mana karyanya dan proyek teoretis yang lebih besar ini berkembang berkaitan dengan munculnya perjuangan untuk hak-hak sipil selama tahun 1960-an, gerakan sosial emansipatoris melawan rasisme, gerakan perdamaian dan feminisme baik sebagai bentuk aktivisme maupun sebagai posisi teoretis. Ini juga berkaitan dengan munculnya gerakan sosial baru sebagai reaksi terhadap gerakan sebelumnya, mulai mempertanyakan gagasan keadilan secara lebih eksklusif dalam kaitannya dengan politik identitas dan pengakuan sosial. Nancy Fraser mendefinisikan keadilan sebagai paritas partisipasi. Menurut interpretasi radikal-demokratis dari prinsip nilai moral yang sama, keadilan membutuhkan pengaturan sosial yang memungkinkan semua untuk berpartisipasi sebagai rekan dalam kehidupan sosial.

Dualisme Konsep Keadilan

Fraser menyadari akan lahirnya konsepsi keadilan dualis yang harus memenuhi prinsip redistribusi dan pengakuan, sambil menyadari bahwa ada dilema internal dan kontradiksi antara prinsip-prinsip ini. Fraser, seperti halnya Young, merujuk pada sejumlah perbedaan yakni; pertama kecacatan, gender, ras, dan seksualitas tetapi mengidentifikasi ketegangan terutama seputar keadilan gender dan ras. 'Kategori dilema' ini menyusahkan setiap metanaratif seputar keadilan sosial karena keharusan mereka yang bersaing. Fundamentalisme gender, misalnya, dapat dengan mudah direduksi menjadi penjelasan biologis tentang perbedaan versus posisi hak asasi manusia universal, yang mengasumsikan kesamaan. Pengakuan budaya membutuhkan rasa keterpaduan budaya yang seringkali

memperkuat tradisi yang dapat menindas dan diskriminatif bagi perempuan, dan dapat bertentangan dengan pengakuan perbedaan gender.

Oleh karena itu, gender dan ras adalah kolektivitas ambivalen, meskipun masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Gender, misalnya, memiliki dimensi politik-ekonomi karena merupakan prinsip dasar penataan ekonomi politik. Di satu sisi, gender menyusun pembagian mendasar antara tenaga kerja 'produktif' berbayar dan tenaga kerja 'reproduktif' tak berbayar dan pekerja rumah tangga, yang menempatkan tanggung jawab utama perempuan pada pekerja rumah tangga. Di sisi lain, gender juga menyusun pembagian dalam tenaga kerja berbayar dengan laki-laki bergaji lebih tinggi mendominasi manufaktur dan pekerjaan profesional dan perempuan bergaji lebih rendah mendominasi 'pink collar' dan pekerjaan jasa rumah tangga. Hasilnya adalah struktur ekonomi politik yang menghasilkan modus eksploitasi khusus gender.

Karena itu Fraser menemukan perbedaan antara ketidakadilan normatif distribusi (maldistribusi) dan ketidakadilan pengakuan (misrecognition) dan mengambil posisi bahwa tidak ada penindasan yang semata-mata karena budaya. Dia katakan bahwa 'misrecognition adalah hubungan sosial yang dilembagakan, bukan keadaan psikologis'. Persoalan status (seperti jenis kelamin atau ras) yang timbul dari misrecognition tidak dapat direduksi menjadi maldistribusi atau sebaliknya. Oleh karena itu misrecognition merupakan ketidakadilan mendasar terlepas dari apakah disertai dengan maldistribusi atau tidak. Jadi kedua jenis kerugian ini, misrecognition dan maldistribution adalah secara fundamental dipahami bersama dan secara konseptual tidak dapat direduksi satu sama lain.

Klaim Redistribusi

Dalam istilah filosofis, redistribusi dan rekognisi (pengakuan) memiliki asal yang berbeda. Redistribusi berasal dari tradisi liberal, terutama Anglo-Amerika akhir abad kedua puluh. Pada 1970-an dan 80-an tradisi ini diperluas dan diperkaya oleh filsuf analitik seperti John Rawls dan Ronald Dworkin. Kedua tokoh ini dikenal dengan teori-teori sosial tentang keadilan distributif. Mereka mencoba mensintesisasikan penekanan liberal tradisional pada kebebasan individu dengan egalitarianisme sosial demokrasi, mereka mengajukan konsepsi baru tentang keadilan yang dapat membenarkan redistribusi sosial-ekonomi.

Klaim redistribusi ini berfokus pada ketidakadilan yang didefinisikan sebagai sosio-ekonomi; dan paradigma pengakuan yang berfokus pada ketidakadilan dipahami sebagai pola budaya representasi, interpretasi dan komunikasi. Dalam paradigma pertama kita mencari "obat" untuk ketidakadilan dalam restrukturisasi hubungan ekonomi; dalam paradigma pengakuan kita mencari "obat" untuk ketidakadilan sosial dalam pertukaran budaya atau simbolik. Pada paradigma pertama kita mencari persamaan.

Sedangkan pada paradigma kedua kita mencari perbedaan. Jika kita memahami ketidakadilan gender dalam konteks normatif yang lebih besar, kita dapat merelokasi distribusi dan pengakuan sebagai cara mengkonfigurasi dua jenis klaim yang berbeda yang merupakan bagian tak terpisahkan dari satu paradigma keadilan. Tuntutan ekonomi dapat dilihat dari perspektif ini sebagai prinsip pengorganisasian dasar dari restrukturisasi masyarakat kapitalis dan kesalahan moral yang ingin mereka perbaiki berada dalam berbagai bentuk ketidakadilan distributif, seperti eksploitasi berbasis gender, marginalisasi, dan perampasan. Dalam aspek lain, yaitu dalam hal bagaimana garis gender ditarik menurut desain andromorfik, kita perlu fokus pada pola kelembagaan penilaian budaya. Kesalahan moral ini merupakan pelanggaran keadilan dalam hal hubungan sosial, desain institusional, dan praktik budaya.

Fraser menempatkan pemikirannya, meskipun kritis, dalam teori redistributif seperti gagasan Marx tentang eksploitasi, definisi Rawls tentang 'keadilan sebagai kewajiban', dan

argumen Amartya Sen bahwa keadilan memerlukan kepastian bahwa semua memiliki kemampuan yang sama untuk berfungsi di dunia, misalnya, dalam pendidikan. Ketidakadilan ekonomi atau maldistribusi melibatkan eksploitasi tenaga kerja, marginalisasi ekonomi karena terbatas pada pekerjaan bergaji rendah, dan kekurangan ketika standar hidup yang memadai ditolak.

Dia juga mengacu pada sumbu ketidakadilan Iris Marion Young yang berfokus pada penindasan budaya dan simbolik Fraser memperlakukan sumbu ketidakadilan ini (kecacatan, gender, ras, dan seksualitas) sebagai kategori analitis, seperti halnya Young, sambil menyadari hal ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata karena semua individu adalah makhluk seksual yang memiliki gender dan rasial, yaitu interseksionalitas perbedaan.

Klaim Rekognisi

Secara bahasa, rekognisi merujuk pada kata bahasa Inggris mengandung makna recognition yang berarti agreement that something is true or legal. Sedangkan dalam bahasa Jerman, menggunakan kata anerkennung berasal dari kata kerja anerkennen yang bermakna mengenal atau mengakui (to recognize). Kata dasar anerkennen adalah erkennen, yang dasar terkecilnya adalah kennen, yang berarti mengetahui atau mengenal (to know atau to be acquainted with). Oleh sebab itu, kata recognition memiliki dan terkait dengan nuansa unsur pengetahuan, pengenalan, dan pengakuan. Pengertian ini lebih tegas menunjukkan bahwa pengakuan adalah hal yang bersifat relasional dan juga legal. Klaim rekognisi ini lebih berfokus pada pencarian perbedaan dari setiap kelas.

Dalam karyanya yang lain, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*, Nancy Fraser membedakan politik pengakuan (politics of recognition) dan politik redistribusi (politics of redistribution), tetapi memiliki keterhubungan antara satu dengan lainnya. Pertama, politik pengakuan berurusan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalism. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural. Klaim pengakuan dalam pemahaman Fraser tidak bisa terbatas pada konteks tertentu. Dengan konsep partitas partisipatifnya, Fraser menghendaki bahwa klaim pengakuan harus bisa dibaca dalam semua bidang kehidupan atau dalam semua lini interaksi sosial. Bahkan menurut analisa Fraser ketidakadilan yang terjadi entah dalam bidang ekonomi, budaya, politik atau pun yang lainnya bisa juga dilihat dalam kaca mata klaim atas pengakuan.

Ketidakadilan ekonomi menunjukkan bahwa harus ada restrukturisasi politik-ekonomi dan redistribusi barang-barang sosial-ekonomi untuk menghasilkan masyarakat yang lebih adil secara sosial. Hal ini mungkin memerlukan, misalnya, mereformasi pembagian kerja berdasarkan gender atau ras, mengurangi ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, mendanai sekolah yang kurang beruntung lebih dari yang lain dan mendanai akses ke pendidikan tinggi untuk kelompok yang kurang beruntung.

Ketidakadilan budaya memerlukan beberapa transformasi budaya atau simbolik seperti menghargai keragaman dalam organisasi, mengubah pola representasi, interpretasi dan komunikasi untuk menanamkan rasa diri yang kuat dan orang lain seperti dengan pendidikan inklusif, atau mempromosikan lebih banyak perempuan dan etnis minoritas ke dalam kepemimpinan. Setiap pemulihan melibatkan redistribusi dan pengakuan. Tapi Fraser berpendapat bahwa di situlah letak dilemanya. Setiap tanggapan ekonomi memiliki konsekuensi budaya dan tanggapan budaya dapat memiliki konsekuensi ekonomi; mereka dapat melanggar atau melemahkan satu sama lain.

Representasi dan Paritas Partisipasi

Fraser berusaha untuk menyelesaikan 'dilema kategori' gender/ras ini, dengan menyatakan bahwa tidak semua masalah *misrecognition* dapat diselesaikan melalui redistribusi, atau masalah *maldistribusi* dapat diatasi melalui pengakuan. Oleh karena itu, Fraser menekankan konsep dua dimensinya tentang keadilan sosial dan inti normatif paritas partisipasi untuk menciptakan cara mengembangkan politik praktis yang meminimalkan *maldistribusi* dan *misrecognition*.

Fraser berargumen demikian, teori distributif telah membahas bagaimana seseorang dapat melakukan distribusi sumber daya yang lebih adil melalui kebijakan pendanaan perpajakan atau pendidikan. Teori pengakuan belum berurusan dengan keadilan redistributif bahkan dalam konteks multikulturalis, meskipun berfokus pada sekolah/komunitas yang kurang beruntung sering membahas keragaman budaya. Fraser berpendapat bahwa jika realisasi diri dan harga diri (masalah pengakuan) adalah masalah inti keadilan sosial, seperti pendapat Honneth dan Young, maka klaim semacam itu juga dapat digunakan untuk membenarkan rasisme atau seksisme. Pengakuan kelompok berdasarkan budaya dapat mengingkari gender individu atau hak seksual. Politik identitas dengan kerangka klasifikasi liberalisme hanya menyalahkan individu atas posisinya sendiri (sosial, politik, ekonomi dan spasial).

Fraser berusaha untuk memperbaiki “ketidakcukupan” sebelumnya dengan dimensi ketiga keadilan sosial, yaitu representasi: 'ketidakadilan politik biasa yang muncul secara internal dalam komunitas politik yang terikat'. Norma paritas partisipasi akan membahas klaim pengakuan karena ini tentang kualitas kondisi material dan hubungan sosial. Artinya, perempuan tidak hanya hadir dalam kepanitiaan tetapi juga didengarkan dan memiliki kapasitas untuk menginformasikan dan mengambil keputusan.

Fraser berpendapat bahwa paritas partisipatif sebagai 'norma universal' mencakup semua “mitra kerja” yang memiliki “nilai” yang sama'. Ini akan mengurangi klaim kerugian oleh mereka yang berada dalam posisi istimewa. Jadi argumen laki-laki kelas menengah kulit putih yang menentang, atau menuntut untuk dimasukkan dalam, program pengembangan kepemimpinan khusus perempuan atau pribumi, atau program serupa atas dasar kesetaraan, umumnya tidak akan memenuhi klaim ini. Semua klaim harus menunjukkan bahwa mereka akan mempromosikan paritas partisipasi dan tidak meningkatkan keuntungan sistemik. Konsep paritas partisipatif Fraser memiliki kemungkinan sebagai salah satu solusi yang kuat atas prinsip keadilan dalam menangani berbagai konflik sosial, perselisihan dan klaim ketidakadilan dalam tatanan global yang baru muncul ini.

Relevansi Dari Konsep Keadilan Nancy Fraser

Konsep keadilan Nancy Fraser sangatlah berguna bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Apabila kita melihat tiga model klaim keadilan Fraser dan relevansinya bagi gender yang tunduk pada struktural masyarakat kapitalis. Klaim keadilan pertama adalah redistribusi. Melalui klaim ini Fraser berfokus pada distribusi sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Fraser memandang pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan keuntungan. Relevansinya klaim keadilan redistribusi bagi Indonesia adalah bahwa negara Indonesia memiliki masalah serius terkait ketidaksetaraan distribusi ekonomi. Penekanan pada keadilan distributif dapat membantu memperbaiki disparitas ekonomi yang ada di Indonesia dengan mempromosikan kebijakan redistribusi yang lebih adil.

Klaim kedua adalah keadilan pengakuan. Fraser menyoroti pentingnya pengakuan terhadap identitas dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Ini mencakup pengakuan

terhadap keberagaman budaya, agama, gender, dan identitas lainnya. Klaim pengakuan menjadi relevan di Indonesia karena keberagaman sangat kaya baik dari segi budaya maupun agama. Klaim ini masih ada tantangan dalam mengakui dan menghargai keragaman ini secara holistik, terutama terkait perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan.

Model ketiga adalah klaim keadilan representasi. Fraser menyoroti pentingnya partisipasi politik yang setara dan inklusif dalam pembentukan keputusan masyarakat. Ini melibatkan memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses politik dan bahwa wakil-wakil yang terpilih mewakili kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok elit. Di Indonesia, keadilan representasi masih menjadi tantangan, terutama dalam hal mewakili suara dari berbagai daerah, etnis, agama, dan kelompok sosial lainnya secara adil dalam pembuatan kebijakan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian teori-teori keadilan sosial Nancy Fraser, niscaya negara Indonesia akan bergerak dan tiba pada masyarakat yang adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Teori multidimensional Fraser tentang redistribusi, pengakuan, dan representasi sangat berguna dalam memahami kompleksitas permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Fraser menyoroti ketidakadilan gender yang masih terbelit dalam struktur kapitalisme dan menegaskan pentingnya partisipasi yang setara bagi semua individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Bagi Fraser, paritas partisipasi adalah inti dari keadilan, di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam interaksi sosial. Dalam konteks globalisasi, perempuan tidak boleh dianggap sebagai kelas kedua, dan upaya untuk meminimalkan ketidakadilan harus memperjuangkan kesetaraan dalam akses dan pengakuan bagi semua individu, terutama perempuan dan kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER;

- Jill Blackmore, 2016, "Education Leadership and Nancy Fraser", New York: Routledge.
Lovell Terry, 2007, "(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice, Nancy Fraser and Pierre Bourdieu", New York: Routledge
Fraser Nancy, 2003, "Social Justice in the Age of Identity Politics", New York: Routledge.
Fraser Nancy, 2013, "Fortunes Of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis", London: Verso.
Mudzakkir Amin, 2022, "Feminisme Kritis Gender dan Kapitalisme Dalam Pemikiran Nancy Fraser", Jakarta; Gramedia Pustaka.
Arruza Cinzia, 2020, "Nancy Fraser, Feminisme untuk 99 0/0 Sebuah Manifesto", Yogyakarta; Penerbit Independen.

SUMBER SEKUNDER;

- Tarigan Andi, 2018, "Tumpuan Keadilan Rawls", Jakarta, Gramedia Pustaka.
Lilijawa Isidorus, 2010 "Perempuan, Media dan Politik", Maumere, Ledalero.
Walters Margaret, 2022, "Feminisme Pengantar Untuk Pemula", Banguntapan Yogyakarta, Ircisod.

JURNAL, INTERNET:

- Purwanto, 2017, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, Vol.1. No.1.
Agus Miswanto, "Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth", JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM, Vol.11, No.2, 2022.
<https://politicalnotmetaphysical.wordpress.com/2016/02/10/redistribution-and-recognition-nancy-fraser-on-social-justice/> diakses pada hari Kamis 01-04-2024 pukul 11:10 Wita.